

INFLUENCE OF FIRM SIZE, INDUSTRY GROUP, ROE WITH CORPORATE DISCLOSURE AND ITS IMPACT TOWARDS ENVIRONMENTAL DISCLOSURE FOR COMPANIES LISTED AT THE JAKARTA STOCK EXCHANGE.

Bambang Sudaryono
Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti

Abstract

This study investigates the interaction and influence of firm size, industry group, ROE with corporate disclosure and its impact towards environmental disclosure for companies listed at the Jakarta Stock Exchange, on 69 listed companies. The type of this research was explanatory research. The method of analysis of this research used linear regression method to examine association between dependent and independent variables. The results show that the independent variables simultaneously influence firm size, industry group, ROE with corporate disclosure on corporate disclosure were tested with level of effect are weak in the range of 9,5% and simultaneously the effect of firm size, industry group, ROE with corporate disclosure and its impact towards environmental disclosure are moderate in the amount of 63%. The difference of the result was caused by different industry groups characteristics and firm size company listed in capital market in Indonesia.

Keywords: firm size, industry group, ROE, corporate disclosure and environmental disclosure

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan publik, ketentuan Bapepam tentang pengungkapan lingkungan bagi perusahaan publik sektor kimia, farmasi dan pertambangan belum begitu memadai. Demikian pula dengan perhatian profesi akuntan publik, khususnya yang tergabung dalam FAPM (Forum Akuntan Publik Pasar Modal) belum terlihat jelas sekalipun dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) sebenarnya terkait dengan unsur pengungkapan (disclosure) telah diungkapkan secara jelas, termasuk pengungkapan sukarela yang memungkinkan perusahaan publik dapat memberikan informasi mengenai dampak-dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat teknologi yang digunakan perusahaan.

Pelaksanaan lingkungan yang masih terkesan asal jadi dan tidak terkoordinasi terlihat pada Kasus Buyat dan Freeport telah menjadi isu nasional. Masih banyak contoh yang dapat dikemukakan, namun dua persoalan lingkungan perusahaan multinasional tersebut sangat menyita perhatian bangsa Indonesia.

Perhatian profesi akuntansi atau akuntan publik yang masih terbatas terhadap masalah lingkungan. Sekalipun sudah ada aturan tentang audit lingkungan hidup. Demikian pula dengan penelitian-penelitian tentang keterkaitan antara profesi akuntansi atau ilmu akuntansi dengan masalah lingkungan hidup. Padahal persoalan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari peran dan kontribusi ilmu akuntansi itu sendiri.

Oleh karena terbatasnya penelitian tentang pengungkapan lingkungan yang terkait dengan ilmu akuntansi maupun praktik akuntansi, maka penelitian ini lebih merupakan kajian pendahuluan atas profil pelaksanaan *social* atau *enviromental disclosure* pada perusahaan publik sektor manufaktur yang tercatat di BEJ untuk tahun buku 2000.

Perhatian pada sektor manufaktur berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Patten (2000) dan Hughes *et al.*, (2000) yang menunjukkan bahwa perusahaan publik yang bergerak di sektor manufaktur yang terbanyak memiliki masalah di bidang lingkungan. Dan berdasarkan klasifikasi perusahaan publik sektor manufaktur yang tercatat dalam Directory BEJ tahun 2005 terdapat 20 sub-sektor dengan jumlah perusahaan sebanyak 156 perusahaan seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Kajian yang dilakukan oleh Hughes *et al.* meneliti tentang hubungan antara pengungkapan lingkungan (*enviromental disclosures*) yang termuat dalam laporan keuangan tahun 1992 dari 20 perusahaan di AS yang dipublikasi oleh majalah Fortune. Kedua puluh perusahaan tersebut terdiri dari 10 perusahaan yang terkemuka dalam masalah lingkungan (*leader in enviromental*) dan perusahaan yang tertinggal dalam pengungkapan lingkungan (*laggard in enviromental performance*).

Informasi pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan korporasi menjadi topik yang menarik di lingkungan profesi akuntansi lebih dari dua dekade. Patten memperlihatkan berbagai penelitian tentang pengungkapan baik lintas waktu maupun lintas perusahaan (Patten, 2000: 102).

Tabel 1.1.
Jumlah Emiten Sektor Manufaktur

No.	Jenis Industri Emiten	Jumlah	%
1	Food and Beverages	20	12.82
2	Tobacco Manufactures	3	1.92
3	Textile Mile Products	9	5.77
4	Apparel and Other Textile Products	19	12.18
5	Lumber and Wood Products	5	3.21
6	Paper and Allied Products	5	3.21
7	Chemical and Allied Products	8	5.13
8	Adhesive	4	2.56
9	Plastics and Glass Products	15	9.62
10	Cement	3	1.92
11	Metal and Allied Products	12	7.69
12	Fabricated Metal product	2	1.28
13	Stone, Clay, Glass and Concrete Products	5	3.21
14	Machinery	2	1.28
15	Cable	6	3.85
16	Electronic and Office Equipment	4	2.56
17	Automotive and Allied Products	18	11.54
18	Photographic Equipment	3	1.92
19	Pharmaceuticals	10	6.41
20	Consumer Goods	3	1.92
	Jumlah	156	100.00

Sumber: Capital Market Directory, 2004

Pada dasarnya pengungkapan lingkungan bersumber dari *social disclosure* yang bersumber dari teori legitimasi yang menekankan bahwa perusahaan yang menggunakan pengungkapan sosial mengandung makna bahwa perusahaan ikut bertanggung jawab pada penciptaan iklim sosial-politik yang baik di mana perusahaan atau lokasi pabrik itu berada.

Patten melakukan pengujian atas peningkatan eksposur *Superfund* pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang dihubungkan pada perusahaan manufaktur di AS. Isyu lingkungan hidup di AS menjadi perhatian dengan adanya *Superfund*. *Superfund* dibuat dengan mengacu pada CERCLA (*Comprehensive Enviromental Response, Compensation, and Liability Act of 1980*) dan perluasan dari SARA (*Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986*).

Letigasi (aspek hukum) *Superfund* memiliki dua tujuan yaitu (a) mengidentifikasi dan (b) membersihkan lingkungan pabrik yang tercemar serta biaya yang ditimbulkannya menjadi beban korporasi. Berdasarkan *Superfund*, EPA (*Environmental Protection Agency*), maka yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan pabrik tidak tercemar adalah: (a) pemilik perusahaan atau operator yang membuang limbah secara serampangan, (b) pemilik atau operator yang menyediakan tempat pembuangan limbah, dan (c) petugas yang bertanggung jawab membuang limbah.

Dengan kata lain, *Superfund* adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah AS yang bersumber dari perusahaan publik, untuk menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri. Sumber *Superfund* terutama dari pajak produk kimia dan perusahaan minyak.

Namun dalam berbagai kajian tentang *disclosure* hanya sedikit saja informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tentang *Superfund*. Menurut Patten, kesenjangan pengungkapan ini dimulai pada pertengahan 1980-an, karena manajemen perusahaan menilai *Superfund* bukan isu nasional yang penting, terbatasnya tenaga ahli yang mengekspos dampak pembuangan limbah pabrik secara liar serta perhatian aparat pemerintah yang menurun atas keputusan perusahaan atas masalah lingkungan hidup.

Hal-hal yang diungkapkan oleh Patten tersebut membuat pengungkapan lingkungan menjadi lemah, sekalipun dalam FASB No. 5 telah dicantumkan ketentuan pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan keuangan korporasi, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan waktu dan standar lingkungan yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Berbeda dengan SEC yang mensyaratkan secara ketat mengenai pengungkapan lingkungan hidup dalam laporan keuangan perusahaan publik.

1. Perumusan Masalah Penelitian

Sehingga masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana profil pengungkapan korporasi (*corporate disclosure*) dan keterkaitannya dengan pengungkapan informasi lingkungan pada perusahaan publik sektor manufaktur di BEJ pada tahun 2003/04.

Selanjutnya berdasarkan masalah pokok penelitian diterjemahkan dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Bagaimana pengungkapan wajib pada perusahaan publik sektor manufaktur di BEJ pada tahun 2000?
2. Bagaimana pengungkapan sukarela pada perusahaan publik sektor manufaktur di BEJ pada tahun 2000?

3. Apakah perusahaan yang memuat pengungkapan sukarela lebih informatif atas pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memuat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Pengungkapan wajib pada perusahaan publik sektor manufaktur di BEJ pada tahun 2000.
2. Pengungkapan sukarela pada perusahaan publik sektor manufaktur di BEJ pada tahun 2000.
3. Perusahaan yang memuat pengungkapan sukarela lebih informatif atas pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memuat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Konseptual

Pengungkapan Perusahaan (*Corporate Disclosure*)

Binsar H. Simanjuntak dan Lusy Widiastuti (2004: 353) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah wahana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya. Untuk memahami tentang, luas atau tidaknya pengungkapan laporan keuangan dapat digunakan *indeks of disclosure methodology* (Binsar H. Simanjuntak dan Lusy Widiastuti, 2004: 353-354) yang dapat menunjukkan kualitas informasi akuntansi yang sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya dapat digunakan:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dengan sajian data-data laporan keuangan yang dapat diinterpertasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), yaitu memiliki tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pemakai laporan keuangan (*user*).
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), yaitu kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan.

Konsep lain tentang pengungkapan diajukan oleh Darrough (1993), dalam Binsar H. Simanjuntak dan Lusy Widiastuti (2004: 354), adanya dua jenis pengungkapan dalam kaitannya dengan persyaratan akuntansi yang berlaku:

1. Pengungkapan wajar (*mandated disclosure*), yaitu pengungkapan mini-

mum yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Terlepas dari bentuk atau jenis pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, minimal akan meningkatkan kredibilitas perusahaan, apalagi dengan bentuk pengungkapan penuh akan sangat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1*, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor dan calon investor, kreditur dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional.

Auda Ainul Mardiyah (2002: 239), menyatakan bahwa, "penyajian laporan keuangan harus disertai dengan *disclosure* yang cukup (*adequate disclosure*) artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.

Laporan tahunan sebagai media yang tepat untuk menyampaikan *corporate disclosure* yang terdiri dan pengungkapan dari sisi keuangan dan bukan keuangan. Secara garis besar, pengungkapan laporan keuangan mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan, termasuk rincian dan tabel-tabel untuk menjelaskan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan secara komparatif dengan periode yang berlaku.
2. Catatan kaki, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam laporan keuangan. Catatan kaki disajikan dengan catatan-catatan yang berhubungan dengan butir-butir neraca dan laporan laba rugi.
3. Data statistik, yang disusun dan diolah dari angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dan umumnya disajikan secara terpisah dalam laporan tambahan.
4. Laporan auditor, merupakan media yang paling sesuai untuk mengungkapkan penyimpangan dan akibat penyimpangan prinsip akuntansi yang diterima umum, perubahan prinsip akuntansi dan akibatnya, dan perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen perusahaan yang diaudit.

Cara lain dapat dilihat dapat keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diantaranya berisi tentang keharusan mengungkapkan informasi publik.

Disclosure untuk pasar modal terdiri dari dua aspek yaitu:

1. *Protective disclosure* yakni sebagai usaha badan pengawas pasar modal untuk melindungi investor dari perlakuan yang tidak wajar dari emiten, sehingga yang termasuk dalam pengungkapan ini adalah yang wajib sifatnya.
2. *Informative disclosure* yakni pengungkapan yang disajikan dalam rangka keterbukaan emiten untuk tujuan analisis investasi, jadi sifatnya adalah pengungkapan sukarela.

Marwata (2000: 156-157) melakukan identifikasi berbagai dimensi yang dipergunakan oleh para ahli atau peneliti mengenai kualitas pengungkapan, yaitu:

1. Kecukupan (*adequacy*).
2. Kelengkapan (*comprehensiveness*).
3. Informatif (*Informativeness*).
4. Tepat waktu (*timelines*).
5. Kelengkapan (*completeness*).
6. Akurasi (*accuracy*).
7. Keandalan (*reliability*).

Dimensi-dimensi kualitas pengungkapan tersebut berupa indeks pengungkapan (*disclosure index*) yang merupakan rasio antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang mungkin dipenuhi. Semakin tinggi angka indeks pengungkapan, maka semakin tinggi kualitas pengungkapan.

2. Pengungkapan Perusahaan Berdasarkan PSAK

Dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Publik) 1994, ketentuan mengenai pengungkapan perusahaan yang dipersyaratkan minimal dan berlaku baik untuk perseroan yang tertutup maupun yang terbuka. Pentingnya masalah pengungkapan tidak terlepas dari adanya perbedaan akuntansi dan perlakuan akuntansi terpilih.

Pengungkapan minimal yang dipersyaratkan dalam PSAK adalah sebagai berikut:

a. Umum

- 1). Kebijakan konsolidasi.
- 2). Konversi atau penjabaran mata uang asing meliputi pengakuan keuntungan dan kerugian pertukaran.
- 3). Kebijakan penilaian menyeluruh seperti harga perolehan, daya beli umum, nilai pergantian.
- 4). Peristiwa setelah tanggal neraca.
- 5). Sewa guna usaha, sewa beli atau transaksi cicilan dan bunga.
- 6). Pajak
- 7). Kontrak jangka panjang.
- 8). Franchise atau waralaba

b. Aktiva

- 1). Piutang.
- 2). Persediaan (persediaan dan barang dalam proses) dan bahan pokok penjualannya.
- 3). Aktiva dapat disusutkan dan penyusutan.
- 4). Tanaman belum menghasilkan.
- 5). Tanah yang dimiliki untuk pembangunan dan biaya pembangunan.
- 6). Investasi pada anak perusahaan, investasi dalam perusahaan asosiasi dan investasi lain.
- 7). Penelitian dan pengembangan.
- 8). Paten dan merek dagang.
- 9). *Goodwill*.

c. Kewajiban dan Penyisihan

- 1). Jaminan.
- 2). Komitmen dan kontijensi.
- 3). Biaya pensiun dan tunjangan hari tua.
- 4). Pesangon dan uang penggantian.

d. Keuntungan dan Kerugian

- 1). Metode pengakuan pendapatan.
- 2). Pemeliharaan, reparasi-perbaikan (*repairs*), dan penyempurnaan-penambahan (*improvement*).
- 3). Untung-rugi penjualan aktiva.
- 4). Akuntansi dana, wajib atau tak wajib, termasuk pembebanan dan pengkreditan langsung ke perkiraan surplus.

Lebih lanjut dalam PSAK dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Perbedaan besar masih terjadi dalam bentuk, kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada. Bukan suatu hal yang terlalu aneh bila dalam sebuah laporan keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan semantara kebijakan akuntansi yang penting lain tidak diungkapkan.

Dalam PSAK disebutkan pula, bahwa pada negara-negara yang mewajibkan pengungkapan atas kebijakan akuntansi penting, tidak selalu tersedia pedoman yang menjamin keseragaman metode pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan pertumbuhan teknologi keuangan internasional telah memperbesar kebutuhan keseragaman laporan keuangan melewati batas negara.

Lebih ditegaskan lagi bahwa laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan perlu diungkapkan, dampak perubahan secara kuantitatif harus dilaporkan. Demikian pula dengan perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkap jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

3. Pengungkapan Perusahaan Berdasarkan Keputusan Bapepam

Bagi perusahaan, pasar modal merupakan salah satu alternative untuk memperoleh dana dari masyarakat yang digunakan untuk memperluas investasi dan mengembangkan kegiatan usahanya. Bagi masyarakat investor dan calon investor, pasar modal merupakan alternative penanaman dana untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan baik berupa dividen yang dibagikan maupun berupa kenaikan nilai pasar (capital gain) surat berharga yang bersangkutan.

Menurut Fischer dan Jordan (1975 : 4) investasi adalah komitmen dana yang dibuat dengan harapan memperoleh suatu tingkat keuntungan (rate of return) tertentu. Jika investasi dilakukan dengan benar pada tingkat risiko yang dapat diterima oleh investor maka keuntungan yang diharapkan akan dapat dicapai. Investasi harus dibedakan dari spekulasi. Investor tertarik dengan tingkat keuntungan yang moderat, yang diperoleh secara konsisten dalam periode waktu yang relative panjang. Sedangkan spekulasi mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat atau dalam kondisi yang tidak normal.

Investasi dalam efek biasanya dikaitkan dengan kemungkinan risiko yang akan dihadapi seperti tingkat dividen yang rendah dan atau turunnya harga pasar efek secara material. Fisher dan Jordan (1975 : 105) membedakan risiko menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis merujuk kepada porsi dari variabilitas tingkat keuntungan sebagai dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga semua efek seperti faktor ekonomi, politik dan perubahan social. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari keseluruhan risiko pada sebuah perusahaan atau suatu industri. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah ketidakmampuan manajemen, perubahan selera konsumen, pemogokan pegawai, dan sebagainya.

Tingkat penjualan, tingkat laba dan harga saham perusahaan-perusahaan dengan risiko sistematis pada suatu pasar modal umumnya cenderung mengikuti tingkat aktivitas ekonomi dan tingkat pasar saham atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menghadapi risiko tidak sistematis umumnya tingkat penjualan, laba dan harga saham yang tidak tergantung pada tingkat aktivitas ekonomi atau aktivitas pasar sekuritas.

Peraturan Pencatatan Bursa Efek Jakarta yang berlaku saat ini adalah peraturan pencatatan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2004 yaitu :

1. Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
2. Peraturan Pencatatan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H Tentang Sanksi;
4. Peraturan Pencatatan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Peraturan-peraturan tersebut di atas diberlakukan sejak tanggal 19 Juli 2004 dan khusus untuk Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi diberlakukan terhitung tanggal 1 Oktober 2004. Peraturan-peraturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Pencatatan Nomor I-A dan Nomor I-B yang berlaku sejak tahun 2000 dan peraturan pencatatan yang terkait dengan ketentuan informasi dan ketentuan sanksi yang dikeluarkan sejak tahun 1992.

Dalam Peraturan Pencatatan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi antara lain disebutkan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bursa Efek yang meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim. Laporan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi berwenang dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal laporan untuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public, 3 bulan untuk laporan keuangan yang diaudit secara terbatas, dan 1 bulan untuk laporan keuangan interim yang tidak diaudit.

Salah satu produk dari sistim informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) dan laporan arus kas (*cash flow statement*). Laporan keuangan tersebut disusun oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia : Standar Akuntansi Keuangan). Agar dapat lebih dipercaya dan bebas dari penyimpangan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh KAP yang independen.

Lebih khusus lagi mengenai pengungkapan wajib diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan. Mengenai bentuk dan isi laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Memuat ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

b. Laporan Manajemen

- 1). Penjelasan Umum, yang memuat berbagai informasi umum yang dianggap penting oleh manajemen.
- 2). Penjelasan Khusus.

c. Bagian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

- 1). Penjualan atau pendapatan.
- 2). Laba kotor.
- 3). Laba usaha.
- 4). Jumlah saham yang beredar.
- 5). Laba (rugi) per saham.
- 6). Proforma penjualan atau pendapatan bersih (jika diperlukan).

- 7). Proforma laba bersih (jika diperlukan).
- 8). Proforma laba (rugi) per saham (jika diperlukan).
- 9). Modal kerja bersih.
- 10). Jumlah aktiva.
- 11). Jumlah investasi.
- 12). Jumlah kewajiban.
- 13). Jumlah ekuitas.
- 14). Rasio laba terhadap jumlah aktiva.
- 15). Rasio laba terhadap ekuitas.
- 16). Rasio lancar.
- 17). Rasio kewajiban terhadap ekuitas.
- 18). Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva.
- 19). Rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan.
- 20). Rasio kecukupan modal.
- 21). Informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan.

d. Bagian mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen.

- 1). Uraian tentang kegiatan usaha.
- 2). Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.
- 3). Bahasan atas risiko bisnis.
- 4). Bahasan informasi keuangan yang luar biasa.
- 5). Uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal.
- 6). Pengungkapan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih.
- 7). Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.
- 8). Keterangan tentang risiko usaha.
- 9). Informasi dan fakta yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan.
- 10). Uraian tentang prospek usaha.

e. Bagian mengenai Laporan Keuangan.

- 1). Laporan keuangan yang sesuai PSAK.
- 2). Laporan keuangan disajikan untuk waktu 2 (dua) tahun buku sebagai berikut:

- a). Neraca;
 - b). Laporan rugi Laba;
 - c). Laporan Saldo Laba;
 - d). Laporan Arus Kas;
 - e). Catatan atas Laporan keuangan;
 - f). Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan, seperti Laporan Komitmen dan Kontijensi untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.
- 3). Catatan atas Laporan Keuangan yang menunjukkan secara terpisah jumlah sari setiap jenis transaksi dan saldo.
 - 4). Mengungkapkan secara wajib semua transaksi yang mempengaruhi akun modal dan mencocokkan dengan saldo awal dan saldo akhir.
 - 5). Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi segmen usaha sesuai PSAK.
 - 6). Informasi tambahan seperti rincian kepemilikan saham, tuntutan hukum, penjualan ekspor atau yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu.

4. Pengungkapan Lingkungan (Environmental Disclosure)

Social disclosure sendiri mengambil dua bentuk yaitu yang wajib (*mandatory*) dan sukareka (*voluntary*). *Social disclosure* tercantum dalam FASB (Financial Accounting Standard Boards) dan US Securities & Exchange Commission (SEC). *Social disclosure* yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan terdiri dari:

- Pengelolaan lingkungan/limbah.
- Praktik bisnis yang wajar.
- Hiring & retention.
- Keterlibatan masyarakat setempat (*community involvement*).
- Informasi produk.

1. Teori ekonomi politik.

Hughes *et al.* teori tentang lingkungan dari sisi ekonomi-politik yang terbatas melakukan kajian. Kelemahan teoritis tersebut tidak hanya pada perbedaan atas level kinerja pengungkapan secara nyata/riil.

2. *Corporate disclosure*.

Teori pengungkapan korporasi dinilai lebih informatif dalam memberikan gambaran kinerja lingkungan yang aktual (Hughes *et al.*,

2000: 153).

Basis teoritis yang digunakan Patten untuk menilai pengungkapan lingkungan dalam hubungannya dengan penggunaan Superfund adalah sebagai berikut:

3. 10K Report berdasarkan ketentuan SEC.
4. Teori legitimasi.

Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial-politik terhadap masyarakat. Teori legitimasi bermuara pada pengungkapan sosial. Pengungkapan sosial yang baik memuat tentang pengungkapan lingkungan hidup. Secara spesifik, Patten menyebutkan tujuan pengungkapan sosial adalah

- (a). *Educate and inform its relevant publics about changes in the firm's performance and activities;*
- (b). *Seek to change the perceptions of the relevant publics,*
- (c). *Manipulate perception by deflecting attention from the issue of concern by focusing on related (presumably more positive) issues,*
- (d) *seek to change the external expectations of its performance.*

5. Teori *political pressure*

Tekanan publik yang menguat melalui berbagai organisasi kemasyarakatan (LSM).

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, Patten menurunkan dua proposisi yaitu:

- a. Pengungkapan Superfund secara eksplisit merupakan signal bagi pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan memiliki masalah lingkungan.
- b. Perusahaan yang melakukan pengungkapan Superfund karena adanya ketentuan atau tekanan dari SEC akan mencoba mengelak dengan melakukan pengungkapan di luar pengungkapan lingkungan hidup.

5. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh *Savage, Casaldo dan Rowlands* (2000: 45-81) terhadap pengungkapan lingkungan (*corporate enviromental disclosure*) pada sejumlah perusahaan kertas/bubur kertas di Kanada pada tahun 1991 hingga 1995. Basis teoritis penelitian ini berlandaskan pada kerangka analisis teori legitimasi. Temuan penelitian mereka mendukung tesis yang diajukan bahwa teori legitimasi dapat dipakai untuk menjelaskan *voluntary enviromental*

disclosure dalam laporan tahunan perusahaan.

Secara garis besar teori legitimasi dapat dikategorikan dalam dua aktivitas utama. *Pertama, aktivitas substantif* seperti perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan atas tujuan, struktur dan proses perusahaan atau keterlibatan perusahaan dalam berbagai aktivitas sosial. *Kedua, aktivitas simbolik*, yang tidak berhubungan langsung dengan keseharian masyarakat tetapi mencoba memotret aktivitas perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Berdasarkan dua aktivitas tersebut, maka ada 12 pilihan strategi seperti disajikan tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Strategi legitimasi yang digunakan dalam pengungkapan lingkungan

Strategi Legitimasi	Pilihan Strategi
1. Strategi substantif	1. 1. Role Performance
	1.2. Coercive isomorphisme
	1.3. Altering socially institutionalized practices
	2.1. Espousing socially acceptable goals
	2.2. Denial and concealment
2. Strategi simbolik	2.3. Identification with symbols, values or institutions
	1.4. Offering accounts
	1.5. Offering apologies
	1.6. Ceremonial conformity
	1.7. admission of guilt
	1.8. Misrepresentation or open to misinterpretation
	1.9. Avoiding, trivialing or skirting around the issue

Sumber: Savage, Casaldo dan Rowlands (2000: 50-51).

Hipotesis utama yang mereka uji adalah Apabila terjadi kesenjangan legitimasi perusahaan yang diakibatkan oleh pemberitaan media massa yang menjadikan perusahaan sebagai target berita tentang kerusakan lingkungan, maka strategi legitimasi untuk merespon nilai-nilai dan sosial komunitas masyarakat akan digunakan perusahaan dengan mencantumkan item voluntary environmental disclosure dalam laporan tahunannya.

Selanjutnya adalah penelitian oleh *Patten* (2000) bertujuan untuk mengetahui apakah saham atas perusahaan publik di Amerika Serikat (AS) atas eksposur *Superfund* pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an memberikan dampak atas informasi lingkungan yang tercantum dalam laporan 10K. Dari 95 perusahaan yang menjadi sampel penelitian terlihat bahwa pengungkapan informasi baik pada *Superfund related* dan *Superfund non-related* lebih ekstensif dalam laporan 10K tahun 1994 dibandingkan pada laporan 10K tahun 1986.

Dengan analisis regresi, *Patten* menggunakan variabel kontrol tambahan untuk mendukung argumen bahwa perbedaan sektoral silang dalam perusahaan informasi *non-superfund* berhubungan dengan pengungkapan *superfund*. Bukti tambahan lain bahwa pengungkapan sosial yang disajikan sebagai fungsi eksposur perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial/politik.

Penelitian ketiga yang cukup penting berhubungan dengan pengungkapan lingkungan adalah kajian yang dilakukan oleh *Hughes et al.* meneliti tentang hubungan antara pengungkapan lingkungan (*enviromental disclosures*) yang termuat dalam laporan keuangan tahun 1992 dari 20 perusahaan di AS yang dipublikasi oleh majalah *Fortune*. Kedua puluh perusahaan tersebut terdiri dari 10 perusahaan yang terkemuka dalam masalah lingkungan (*leader in enviromental*) dan perusahaan yang tertinggal dalam pengungkapan lingkungan (*laggard in enviromental performance*).

Kemudian diperbandingkan antara kedua kelompok perusahaan tersebut untuk melihat apakah ada hubungan antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan korporasi. *Hughes et al.* menunjukkan bahwa korporasi yang tergolong *laggard* secara signifikan lebih besar hubungannya dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dibandingkan dengan perusahaan yang *leader*. Namun perbedaan kedua kelompok perusahaan ini kecil dalam hal pengungkapan secara sukarela (*Hughes et al., 2000: 153-155*).

Dengan demikian, kedua kelompok perusahaan tersebut masih harus menata ulang basis pengungkapan lingkungan, karena perusahaan yang *leader* justru kinerja dari sisi lingkungan tidak berbeda jauh dibandingkan dengan perusahaan yang tertinggal dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian keempat, dilakukan oleh *Fonad K. Alnajjar* (2000: 163-200) atas 500 perusahaan di Amerika Serikat dengan fokus kajian pada pola pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility disclosures - SRD*). Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian *Alnajjar* adalah *content analysis* untuk mengukur pengungkapan secara monetari, kuantitatif dan naratif pada area komunitas, sumber daya manusia, lingkungan

dan keamanan produk. Alnajjar juga melakukan pengujian hubungan (korelasi) antara sejumlah karakteristik perusahaan dan area serta tipe SRD.

Hasilnya adalah *total SRD dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan, ROA dan jenis industri yang bergerak di bidang makanan, minuman dan tembakau*. SSRD juga secara signifikan dipengaruhi oleh area pengungkapan seperti *community involvement, perlindungan lingkungan, sumber daya manusia dan keamanan produk* (produksi). Demikian pula dengan *tipe pengungkapan seperti monetari, kuantitatif dan narative* sangat signifikan terhadap tipe SRD.

Penelitian kelima oleh *Kathryn Bewley dan Yue Lie* (2000: 200-226) atas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Kanada tahun 1993. Variabel yang diuji adalah berbagai faktor yang terkait dengan pengungkapan lingkungan seperti ketaatan terhadap standar polusi, politik exposure, data pelanggaran lingkungan, auditor independen, dan ROA.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *voluntary disclosure* dapat dijelaskan oleh pengungkapan perusahaan secara umum dan informasi lingkungan dan seksi laporan keuangan. Tekanan media massa, peraturan lingkungan (polusi) yang ketat dan ekposur politik mempengaruhi pengungkapan secara umum.

Penelitian keenam dari *Herbert G. Hunt III dan D. Jacque Grinnell* (2004: 101-120) lebih banyak merupakan penelitian eksplorasi atas sikap investor dalam melakukan valuasi (valuation model) atas kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan aspek lingkungan. Hasilnya bahwa informasi atau pengungkapan lingkungan merupakan informasi yang belum reliabel bagi investor dalam melakukan valuasi terhadap perusahaan.

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan teoritis dalam penelitian ini ialah penelitian *W. Darrel Walden dan A.J. Stagliano* (2004: 137-165) yang menggali berbagai tema dengan pengungkapan lingkungan yang digunakan manajemen dalam mengkomunikasikannya pada laporan keuangan dan laporan non-keuangan. Juga dilakukan eksplorasi hubungan antara tema-tema pengungkapan dengan kinerja lingkungan.

Temuannya atas 53 perusahaan AS pada empat kelompok industri utama memperlihatkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan berisi informasi yang memfokuskan pada sisi pengeluaran (expenditures) dan kontigensi. Pengungkapan lingkungan dalam laporan non-keuangan, umumnya berisi informasi tentang pengurangan polusi pabrik dan data tentang lingkungan. Tingginya kualitas pengungkapan lingkungan berhubungan dengan *enviromental expenditures* dan kontigensi

lingkungan. Sementara informasi tentang polusi dan aspek lingkungan lainnya lebih rendah bobotnya. Hasil penelitian Walden dan Stagliano yang terpenting adalah mendukung proposisi dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa *hubungan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan adalah relatif lemah.*

6. Kesimpulan Teoritik

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang diungkapkan di atas, maka kesimpulan teoritik yang bisa dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Teori legitimasi dapat dipakai untuk menjelaskan voluntary environmental disclosure dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga apabila terjadi kesenjangan legitimasi perusahaan yang diakibatkan oleh pemberitaan media massa yang menjadikan perusahaan sebagai target berita tentang kerusakan lingkungan, maka strategi legitimasi untuk merespon nilai-nilai dan sosial komunitas masyarakat akan digunakan perusahaan dengan mencantumkan item voluntary environmental discloser dalam laporan tahunannya.
2. Pengungkapan sosial yang disajikan sebagai fungsi eksposur perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial/politik.
3. Perusahaan yang mengabaikan masalah lingkungan lebih fokus pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dibandingkan dengan perusahaan yang peduli dengan masalah lingkungan. Sekalipun perbedaan kedua kelompok perusahaan tersebut kecil dalam hal pengungkapan secara sukarela.
4. Total SRD dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan, ROA dan jenis industri yang bergerak di bidang makanan, minuman dan tembakau. SSRD juga secara signifikan dipengaruhi oleh area pengungkapan seperti *community involvement*, perlindungan lingkungan, sumber daya manusia dan keamanan produk (produksi). Demikian pula dengan tipe pengungkapan seperti moneteri, kuantitatif dan narative sangat signifikan terhadap tipe SRD.
5. Voluntary disclosure dapat dijelaskan oleh pengungkapan perusahaan secara umum dan informasi lingkungan dan seksi laporan keuangan. Tekanan media massa, peraturan lingkungan (polusi) yang ketat dan ekposur politik mempengaruhi pengungkapan secara umum.
6. Informasi atau pengungkapan lingkungan merupakan informasi yang belum reliabel bagi investor dalam melakukan valuasi terhadap perusahaan.

7. Tingginya kualitas pengungkapan lingkungan berhubungan dengan environmental expenditures dan kontigensi lingkungan, tetapi hubungan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan adalah relatif lemah.
8. Terakhir adalah rangkuman mengenai klasifikasi pengungkapan wajib, sukarela, dan lingkungan yang bersumber dari PSAK, Bapepam, PBB dan Wiseman Index seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Perbandingan Pengungkapan Wajib dan Sukarela berdasarkan PSAK dan Bapepam

Kategori	PSAK	Bapepam
Wajib	Umum	Umum
	Aktiva	Laporan Manajemen
	Kewajiban dan Penyisihan	Ikhtisar Data Keuangan Penting
	Keuntungan dan Kerugian	Analisis dan Pembahasan
Sukarela		Laporan Keuangan
		Proforma Penjualan/ Pendapatan Bersih
		Proforma Laba Bersih
		Proforma Laba (Rugi)

METODOLOGI PENELITIAN

1. Disain Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efektif dan sistematis mengenai suatu permasalahan, yang hasilnya berguna untuk mengetahui suatu keadaan atau permasalahan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan atau untuk membuat keputusan dalam memecahkan permasalahan. Karena itu, setiap penelitian dimulai dengan suatu rancangan (*design*). Rancangan penelitian (*research design*) ini terdiri dari satuan analisis dan satuan pengamatan serta jenis metode penelitian.

2. Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan

Satuan analisis (*units of analysis and observation*) adalah kepada siapa kesimpulan diberlakukan, sedangkan satuan pengamatan adalah dari siapa data diperoleh. Satuan analisis (unit of analysis) adalah populasi perusahaan-perusahaan publik BEJ paling aktif selama kurun waktu 2000. Sedangkan satuan pengamatan yang dipilih adalah pengungkapan wajib, pengungkapan sukarela dan informasi tentang lingkungan.

3. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria yang harus dipenuhi anggota satuan analisis pengamatan untuk dipilih sebagai sampel akhir adalah sebagai berikut:

- (1). Saham perusahaan publik yang tercatat di BEJ haruslah yang paling aktif ditransaksikan dan sudah tercatat di BEJ sejak tahun 2000.
- (2). Data laporan keuangan satuan pengamatan harus bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit KAP yang diakui BAPEPAM.
- (3). Saham-saham perusahaan sampel tidak dalam status "delisted" atau "suspended" selama periode pengamatan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari : gambaran umum perkembangan perusahaan, laporan manajemen, ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan serta laporan keuangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah metode dokumentasi kepustakaan baik berupa jurnal, directory, compact disk, data base BAPEPAM, maupun sumber lain seperti harian.

6. Metoda Analisa Data

Validasi model pertama digunakan terdiri dari

- (a) model regresi sederhana dan
- (b) model regresi ganda.

a. Model Regresi Sederhana

Model regresi sederhana (*first-order or straight-line model*) dapat ditulis sebagai berikut:

$$y = (o + (1 x + (\quad \quad \quad (3.1)$$

where

y = Dependent or response variable (variable to be modeled)

x = Independent or predictor variable (variable used as a predictor of y)

(ϵ) = Random error component

$(o$ (beta zero) = y -intercept of the line – – i.e. point at which the line intercepts or cuts through the y -axis...

$(1$ (beta one) = slope of the line – i.e., amount of increase (or decrease) in the deterministic component of y for every 1 unit increase in x .. ”

b. Model Regresi Ganda

Regresi berganda yang akan digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_{1ij} + \beta_2 X_{2ij} + \epsilon_{ii} \quad (3.2)$$
 Nilai *dependent (response) variable* y adalah suatu fungsi dari *independent (predictor) variables* X_{1ij} dan X_{2ij} , di mana i adalah perusahaan ke i dan j adalah tahun ke j . *Independent (predictor) variable* X_1 adalah skor pengungkapan wajib, X_2 adalah pengungkapan sukarela. Sedangkan *dependent variable* adalah informasi lingkungan.

Hipotesis Statistik (HS) dan Pengujian Signifikansi

Berdasarkan model analisis yang dibangun (formula 3.1 dan 3.2), penulis merumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

a. Hipotesis Statistik (HS) Regresi Sederhana

HS 1 : $H_0 : \beta_{ii} = 0;$
 $H_a : \beta_1 \neq 0$
 β_{ii} untuk koefisien regresi variable bebas ke i pada periode ke t
 Daerah penolakan : $t < t_{\alpha/2}$ atau $t > t_{\alpha/2}$ di mana $t_{\alpha/2}$ didasarkan $(n-2)$ df.

b. Hipotesis Statistik (HS) Regresi Ganda

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$
 H_A : Minimal satu di antara parameter β_j tidak sama dengan nol (*at least one model term is useful for predicting y*).

Test statistic adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(SS_{yy} - SSE) / k}{SSE / [n - (k + 1)]} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - (k + 1))} = \frac{MEAN\ SQUARE\ (MODEL)}{MEAN\ SQUARE\ (ERROR)}$$

where n is the sample size and k is the number of terms in the model.
 Rejection region : $F > F_{\alpha}$, with k numerator degree of freedom and $[n - (k + 1)]$ denominator degree of freedom.

Untuk pengujian validasi model yang kedua digunakan adalah analisis diskriminan, dengan pertimbangan:

- Adanya variabel dependen dalam skala nominal (kategorikal) yaitu tiga jenis jasa yang berbeda dan variabel independen dalam skala sekurang-kurangnya interval (metrik). Jumlah kelompok (group) variabel dependen (kategorikal) boleh lebih dari dua yang bersifat *mutually exclusive* dan *exhaustive*.

- Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi seperti:
- Independen variabel mempunyai dsitribusi normal dan struktur (matrik) covariance (kovarians) dan dispersi tidak diketahui tetapi sama. Matrik kovarian yang tidak sama berdampak negatif pada proses klasifikasi.
- Tidak terdapat multikolinearitas
- Semua hubungan yang ada linear
- Tidak terdapat *outlier*.

Untuk menghitung signifikansi digunakan rumus Z-scores sebagai berikut:

$$Z_{jk} = a + W_1 X_{1k} + W_2 X_{2k} + \dots W_n X_{nk}$$

Perhitungan pengujian hipotesis dengan analisis diskriminan dengan menggunakan paket program SPSS versi yang terakhir.

VALIDASI MODEL PENGUNGKAPAN WAJIB DAN SUKARELA

Hasil penelitian mencakup gambaran mengenai perusahaan yang masuk dalam objek penelitian dengan memperhatikan informasi tentang lingkungan dan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan secara tertulis dalam laporan tahunannya. Selanjutnya berdasarkan data secara acak dari 10 perusahaan yang dipilih dilakukan uji validasi model penelitian yang digunakan. Gagasan semula adalah menggunakan analisis regresi berganda, tetapi berdasarkan hasil eksplorasi awal, maka model validasi yang dimungkinkan adalah dengan analisis diskriminan.

1. Analisis Deskripsi

Tabel 4.1. merupakan hasil olahan data mentah untuk melakukan pengujian atau validasi model penelitian mengenai keterkaitan antara pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) atas 10 perusahaan publik yang dipilih secara acak. Hasilnya terdapat 6 perusahaan publik yang memberikan informasi tentang lingkungan dan 4 perusahaan publik yang menyediakan informasi sosial dalam laporan tahun 2000.

Contoh informasi lingkungan yang disampaikan adalah seperti kutipan berikut ini,

“Telah menjadi prinsip Perusahaan untuk selalu berada dalam industri yang ramah lingkungan. Jenis produk maupun proses produksi memungkinkan sisa hasil produksi maupun hasil

produksi yang tidak sempurna didaur ulang serta digunakan sebagai digunakan sebagai bahan baku ... Dengan proses tersebut, limbah produksi juga dapat diminimalkan". (Annual Report 2000 PT Langgeng Makmur Industri Tbk.).

Contoh informasi tanggung jawab sosial perusahaan yang disampaikan adalah seperti kutipan berikut ini, "kontribusi sosial kepada masyarakat yang telah dilakukan Bentoel selama tahun 2000 antara lain: ...". (Annual Report 2000 PT Bentoel Tbk.).

Tabel 4.1.
Perbandingan Total Skor Pengungkapan Wajib dan Sukarela 10 Perusahaan Publik Tahun 2000

Emiten	IL S	Mandatory Disclosure						Voluntary Disclosure						
		U	LM	IDK			Σ	PPPB	PLB	PL (R)	FR	HRDL	L	Σ
				P	AP	LK								
Bakrie SP	1	1	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	1	3
Asiaplast Industries	1	1	0	1	0	1	3	1	1	1	0	0	1	4
Langgeng MI	1	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	2
Astra AL	1	1	1	0	1	1	4	1	1	1	0	1	1	5
Unggul IC	1	1	1	1	0	1	4	1	1	1	1	0	1	5
Timah	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	0	0	1	4
Sinar MM	2	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	1	1	2
Komatsu	2	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1
Bentoel	2	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1
Tri Polyta	2	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	2
	Σ	10	6	7	5	10	38	4	4	4	2	5	10	29

Keterangan:

ILS : (Informasi Lingkungan/Sosial: Angka 1 untuk informasi lingkungan dan angka 0 untuk informasi sosial)

U : Umum

LM : Laporan Manajemen

IDKP : Ikhtisar Data Keuangan Penting (19 item)

AP : Analisis dan Pembahasan (10 item)

LK : Laporan Keuangan (6 item)

PPPB : Proformasi Penjualan/Pendapatan Bersih

- PLB : Proforma Laba Bersih
PL(R) : Proforma Laba (Rugi)
FR : Faktor Risiko
HRD : *Human Resources Development*
L : Lainnya (termasuk tentang GCG)

Umumnya pengungkapan informasi tentang lingkungan termuat dalam bagian pengungkapan wajib pada bagian umum dan bagian laporan manajemen atau disertakan setelah bagian laporan keuangan.

Hasil olahan dari Tabel 4.1. cukup menarik, karena pengungkapan wajib saja sebagaimana yang diatur Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996, tidak dipatuhi. Dari lima pokok utama pengungkapan wajib hanya PT Timah Tbk dan PT Simar Mas Muliartha yang mematuhi. Ketidakpatuhan pengungkapan wajib yang paling menonjol adalah pada analisis dan pembahasan yang hanya dipatuhi oleh lima perusahaan (50%). Bila dipersentasekan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib adalah $38/50 = 0.75$ atau 76%.

Pada kolom pengungkapan sukarela juga terdapat informasi yang menarik bahwa faktor bisnis etrbilang sedikit diinformasikan kepada publik. Umumnya faktor risiko bisnis ditantumkan pada bagian laporan manajemen atau analisis dan pembahasan yang dikemukakan oleh manajemen (Dewan Direksi).

PT Timah Tbk, sebagai contoh, memberikan informasi paling lengkap dibandingkan dengan 9 perusahaan publik lainnya dengan memuat secara lengkap tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), tetapi ironisnya informasi tentang pengembangan sumber daya informasi tidak tersaji dalam laporan tahunan perusahaan publik ini. Sementara pengungkap sukarela yang paling sering disampaikan oleh perusahaan publik lainnya adalah mengenai pengembangan SDM di perusahaan yang bersangkutan.

Bila dipersentasekan tingkat kesukarelaan atas pengungkapan ini adalah $26/60 = 0.46$ atau 46%. Suatu persentase yang tidak terlalu buruk sebenarnya, karena kalupun perusahaan publik tidak memberikan informasi tidak akan terkena sanksi dari pihak regulator (Bapepam).

Tabel 4.2.
Data Validasi Model Penelitian

No.	Perusahaan Publik	Informasi Lingkungan/ Sosial	Mandatory	Voluntary
1	Bakrie Sumatera Plantations	1	3	3
2	Asiaplast Industries	1	3	4
3	Langgeng Makmur Industri	1	4	2
4	Astra Agro Lestari	1	4	5
5	Unggul Indah Cahaya	1	4	5
6	Timah	1	5	4
7	Sinar Mas Multiartha	0	5	2
8	Komatsu Indonesia	0	3	1
9	Bentoel	0	3	1
10	Tri Polyta Indonesia	0	4	2
		Jumlah	38	29

Data yang ada dalam Tabel 4.1. dijadikan dasar untuk melakukan validasi, yang hasil pengolahannya ditransformasikan pada program SPSS seperti pada Tabel 4.2. ini. Angka 1 pada kolom informasi lingkungan/ sosial menunjukkan perusahaan publik yang menyajikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan yang bersentuhan dengan persoalan-persoalan lingkungan. Sedangkan angka 0 menunjukkan perusahaan yang memberikan informasi tentang peran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kolom *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* merupakan jumlah pokok-pokok informasi yang tertuang dalam laporan tahun 2000 ke-10 perusahaan publik yang dipilih secara acak tersebut.

2. Validasi dengan Model Regresi Berganda

Dalam model summary (Tabel 4.3.) diperlihatkan hasil $R^2 = 0.649$ atau R^2 yang adjusted = 0.549 atau 54.9% yang memberikan pengertian bahwa secara bersama-sama variabel pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi tentang lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan sekitar 55%. Variabel lain yang tidak diteliti atau masuk dalam validasi model seperti jenis industri, KAP, difisiensi modal, dan setrusnya memberikan pengaruh sebesar 45%.

Tabel 4.3.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.649	.549	.3467

a. Predictors: (Constant), Voluntary, Mandatory

Apakah kedua jenis pengungkapan tersebut signifikan, maka dalam Tabel 4.4. dapat diketahui nilai F_{hitung} yang diperoleh = 6.481 dengan tingkat signifikansi = 0.026, berarti pengaruh kedua variabel tersebut secara bersamaan adalah signifikan karena nilai $p < 0.05$.

Tabel 4.4.
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.558	2	.779	6.481	.026 ^a
	Residual	.842	7	.120		
	Total	2.400	9			

a. Predictors: (Constant), Voluntary, Mandatory

b. Dependent Variable: Kategori

Kemudian bagaimana pengaruh masing-masing variabel yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* secara individual, maka Tabel 8 menyajikan informasi yang memenuhi kebutuhan tersebut.

Tabel 4.5.
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.182	.573		.318	.760
	Mandatory	-.105	.152	-.161	-.694	.510
	Voluntary	.282	.079	.832	3.592	.009

a. Dependent Variable: Kategori

Dengan nilai koefisien beta yang distandarisasi dari *mandatory disclosure* = -1.61, dengan nilai t_{hitung} = -0.694 dan nilai signifikansi = 0.510, yang berarti pengaruh *mandatory disclosure* terhadap informasi lingkungan/sosial adalah negatif dan tidak signifikan karena nilai $p > 0.05$.

Untuk nilai koefisien beta yang distandarisasi dari *voluntary disclosure* = 0.832, dengan nilai $t_{hitung} = 3.592$ dan nilai signifikansi = 0.009, yang berarti pengaruh *voluntary disclosure* terhadap informasi lingkungan/sosial adalah positif dan signifikan karena nilai $p < 0.05$.

Persamaan umum yang dihasilkan adalah *informasi lingkungan/sosial* = $0.182 - 0.105 MD + 0.282 VD + e$. Berdasarkan persamaan ini, maka setiap penambahan *mandatory disclosure* akan mengurangi kontribusi terhadap informasi lingkungan/sosial sebesar 0.105, sebaliknya setiap penambahan *voluntary disclosure* akan menambah kontribusi terhadap informasi lingkungan/sosial sebesar 0.282.

Hasil validasi penelitian ini untuk sementara mendukung hasil penelitian Hughes *et al.* (2000) bahwa perusahaan yang hanya memenuhi pengungkapan wajib umumnya lemah dalam pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan korporasi. menunjukkan bahwa korporasi yang tergolong *laggard* secara signifikan lebih besar hubungannya dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dibandingkan dengan perusahaan yang *leader* dalam kinerja lingkungan yang lebih baik.

3. Validasi dengan Model Analisis Diskriminan

Pada dasarnya antara analisis regresi dengan analisis diskriminan memiliki persamaan yaitu bersifat linear. Perbedaan mendasar hanya pada variabel tidak bebas (dependent). Pada persamaan regresi, maka variabel tidak bebas harus sekurang-kurangnya berskala interval/ratio atau sering disebut sebagai skala metrik. Sementara pada analisis diskriminan variabel tidak bebas, berupa skala kategorikal (non-metrik) seperti KAP Besar, KAP Menengah dan Kecil.

Tabel 4.6.

Rata-rata Perbandingan Variabel Independen dengan Informasi Lingkungan/Sosial dan Uji Signifikansi secara Univariat

Variabel Independen	Mean Variabel Dependen		Tests of Equality of Group Means		
	Environmental	Social	Wilks' Lambda	F	Sig
Mandatory Disclosure	3.83	3.75	0.997	0.024	0.88
Voluntary Disclosure	3.83	1.50	0.375	13.345	0.00

Melihat nilai rata-rata *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* (Tabel 4.6.), maka untuk rata-rata informasi lingkungan mendapat nilai yang sama yaitu 3.83, tetapi untuk *mandatory disclosure* mendapat nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu 3.75 sementara *voluntary* hanya, mendapat nilai rata-rata = 1.50. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *mandatory disclosure* memberikan informasi yang lebih baik tentang lingkungan/ sosial secara rata-rata.

Untuk kriteria keputusan hipotesis apakah diterima bila nilai signifikansi lebih besar dari $?? < 0.05$. Hasil pengujian secara univariat (Tabel 4.6.), maka justru *voluntary disclosure* yang mendapat nilai $?? < 0.05$. Kriteria tambahan dari uji univariat dengan kecilnya nilai Wilk's lambda dan nilai F_{hitung} yang besar, maka perbedaan rata-rata antara kelompok yang diteliti semakin signifikan. *Voluntary disclosure* memperlihatkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara informasi lingkungan/ sosial, tapi *mandatory disclosure* tidak memperlihatkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara informasi lingkungan dan informasi sosial.

Tabel 4.7.
Fungsi Diskriminan Kanonika

Fungsi	Eigenvalu e	% Varian		Korelasi Kanonik al	Wilks' Lambda	Chi- square	df	sig
		Fungsi	Kum.					
1	1.852	100.0	100. 0	0.806	0.351	7.336	2	0.02 6

Koefisien korelasi kanonikal dalam Tabel 4.7. pada fungsi pertama sebesar 0.806 adalah korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan. Korelasi kanonikal yang dikuadratkan untuk fungsi pertama menjadi $= (0.806)^2 = 0.6496$. Pengertiannya bahwa 64.96% dari informasi lingkungan dan sosial dijelaskan oleh *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Koefisien korelasi memiliki pengertian yang sama dengan koefisien diterminasi (R^2) dalam analisis regresi.

Pada Tabel 4.7. juga terdapat hasil perhitungan Chi-square = 7.336 dengan nilai signifikansi = 0.026. Interpretasinya bahwa uji Chi-square pada fungsi pertama tersebut memperlihatkan adanya perbedaan secara nyata antara informasi lingkungan dan sosial. Uji Chi-square dalam analisis diskriminan serupa dengan uji F (ANOVA) dalam analisis regresi (berganda).

Nilai loading dalam struktur matrik (Tabel 4.8.) digunakan untuk meninterpretasikan kekuatan diskriminasi secara umum. Nilai loading yang lebih besar dari 0.30 dipandang penting. Dalam tabel tersebut, *voluntary disclosure* mendapat nilai lebih besar dari 0.30 yaitu 0.949. Sehingga dapat dikatakan bahwa *voluntary disclosure* memiliki kekuatan diskriminasi yang signifikan terhadap ketersediaan informasi lingkungan/sosial. Sementara *mandatory disclosure* memiliki kekuatan diskriminasi yang sangat lemah atas ketersediaan informasi lingkungan/sosial.

Tabel 4.8.

Structure Matrix

	Function
	1
Voluntary	.949
Mandatory	.040

Fungsi diskriminan dari Fisher linear (Tabel 4.9.) digunakan persamaannya serupa dengan regresi yang ditulis sebagai:

$$\begin{aligned}
 Z_{\text{Score Social}} &= -10.770 + 5.406\text{MD} - 0.978\text{VD} \\
 Z_{\text{Score Environmental}} &= -14.124 + 4.405\text{MD} + \text{VD}
 \end{aligned}$$

Tabel 4.9.

Classification Function Coefficients

	Kategori	
	Social	Environmental
Mandatory	5.406	4.405
Voluntary	-.078	2.603
(Constant)	-10.770	-14.124

Fisher's linear discriminant functions

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian validasi model secara deskriptif adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib adalah $38/50 = 0.75$ atau 76%, sedangkan tingkat kesukarelaan atas pengungkapan ini adalah $26/60 = 0.46$ atau 46% dari 10 perusahaan publik yang diteliti.

Validasi model dengan analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi tentang lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan sekitar 55%. Pengaruh kedua variabel tersebut secara bersamaan adalah signifikan karena nilai $p < 0.05$. Validasi model pengaruh secara individual, dari *mandatory disclosure* terhadap informasi lingkungan/sosial adalah negatif dan tidak signifikan karena nilai $p > 0.05$, sedangkan dari *voluntary disclosure* terhadap informasi lingkungan/sosial adalah positif dan signifikan karena nilai $p < 0.05$.

Validasi model secara univariat *voluntary disclosure* yang mendapat nilai $p < 0.05$. *Voluntary disclosure* memperlihatkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara informasi lingkungan/sosial, tapi *mandatory disclosure* tidak memperlihatkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara informasi lingkungan dan informasi sosial. *Voluntary disclosure* mendapat nilai loading yang lebih besar dari 0.30 yaitu 0.949. Sehingga dapat dikatakan bahwa *voluntary disclosure* memiliki kekuatan diskriminasi yang signifikan terhadap ketersediaan informasi lingkungan/sosial. Sementara *mandatory disclosure* memiliki kekuatan diskriminasi yang sangat lemah atas ketersediaan informasi lingkungan/sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, and James K, Loebbecke, (2005), "*Auditing, An Integrated Approach*" 10th Edition, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Boynton, W.C & W.C Kell, (2003), "*Modern Auditing*", 7th Edition, New York: John Wiley & Sons.
- David James 1994, "*The Application of Economic Techniques in Environmental Impact Assessment*" Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, London.
- Goldin Ian dan L. Alan Winters, 1994. *The Economics of Sustainable Development*, Melbourne: Cambridge University Press.
- Hughes, Susan B., James F. Sander dan Joanna C. Reier, 2000. "*Do Environmental Disclosures in US Annual Reports Differ by Environmental Performance?*"

Advances in Environmental Accounting and Management, Vol. 1. page 141-161.

Institute for Economic and Financial Research, *Indonesian Capital Market Directory*, Jakarta, 2000.

Ikatan Akuntan Indonesia, (1996), "*Profesi Akuntan Indonesia Menuju Milenium Baru, Prosiding Konversi Nasional Akuntansi (KNA) Ke-3*", Jakarta, Penerbit Divisi Publikasi IAI

-----, Kompartemen Akuntan Publik, (2001), "*Standar Profesional Akuntan Publik, Per 1 Januari 2001*", Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

-----, (2004), "*Standar Akuntansi Keuangan*", Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

-----, (2000), "*Symposium Nasional Akuntansi*", Jakarta : Kompartemen Akuntan Pendidik IAI.

Konrath, Laweey F, (1999), "*Auditing Concepts and Applications, A Risk-analysis Approach*", 4nd Edition, New Jersey, West Publishing Company.

Martion Freedman, Bikki Jaggi Vol. 2 (2004) "*Advances in Environmental Accounting & Management*" Elsevier, JAI, Amsterdam

Pearce, David W dan R. Kerry Turner, 1990. *Economics of Natural Resources and The Environment*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Patten, Dennis M., 2000. "*Changing Superfund Disclosure and Its Relation to the Provision of other Environmental Information.*" *Advances in Environmental Accounting and Management*, Vol. 1. page 101-121.

Rob Gray and Jan Bebbington, 2001, "*Accounting for the Environment*, Second Edition, Sage Publications London.

SAS 78 (1992), "*Standar Audit and Statement*", New York, Institute Internal Audit.

Whittington, Pany (2003), "*Principle of Auditing*", New York, Publish. Mc. Graw Hill